BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal pendiriannya, kemunculan *bayt al māl wa tamwīl* (BMT) diharapkan oleh banyak kalangan mampu menunjang upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.[1] BMT sebagai lembaga keuangan mikro diyakini mampu untuk meningkatkan perekonomian kaum miskin dan menunjang pembangunan ekonomi.[2]

Keberadaan BMT yang telah tersebar di berbagai wilayah pelosok tanah air semakin memberi harapan segar bagi upaya pemberdayaan ini. Apalagi BMT mulai banyak beroperasi di wilayah pedesaan.[3] Daerah pedesaan biasanya menjadi sasaran bagi rentenir untuk beroperasi dengan memanfaatkan sulitnya akses

---

[1] Pada awalnya BMT beroperasi dalam bentuk perkumpulan, yayasan maupun koperasi. Dalam perkembangannya, keberadaan BMT lebih condong kepada badan hukum koperasi, yaitu koperasi jasa keuangan syariah yang menjalankan kegiatan serba usaha atau sektor riil untuk memenuhi kebutuhan anggotanya maupun masyarakat. Keberadaan BMT yang berbadan hukum koperasi ini, secara operasional dinaungi oleh UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

[2] Mohammed El-Komi and Rachel Groson, "Experiments in Islamic Microfinance", *Journal of Economic Behavior and Organization*, Vol. 83. No. 2, (2012), 1.

[3] Asosiasi BMT se-Indonesia (ABSINDO) memprogramkan satu desa satu BMT, itu artinya akan segera dibuka sebanyak 8.206 BMT. Jumlah BMT pada tahun 2010 saja sekitar 4.000 BMT yang beroperasi di Indonesia yang terus dikembangkan secara masif. Jumlah BMT/KJKS per April 2012 adalah sekitar 4.117 unit dengan jumlah anggota sekitar 762 ribu anggota dan total asetnya mencapai Rp 5 triliun-Rp 8 triliun. Jumlah ini akan semakin bertambah pada masa mendatang dengan ditunjang program-program tersebut. Mereka menyakini hasil riset *world bank* yang menyatakan bahwa untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dilakukan melalui pendekatan lembaga keuangan mikro. Keyakinan terhadap riset tersebut mendorong pengembangan BMT untuk masuk ke desa-desa sehingga diyakini akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selengkapnya dapat dibaca dalam Nyadin, "Prospek Bisnis Di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Mal Wa Tamwil dan Peluang Kerja Bagi Alumni Program Ekonomi Syariah", Makalah dipresentasikan di IAIN Sunan Ampel Surabaya, 27 Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan serta tingkat pendidikan dan ekonomi yang masih rendah. Oleh karena itu BMT diharapkan mampu mengatasi problem perekonomian masyarakat yang disebabkan oleh besarnya rentenir.[4]

BMT yang bernuansa Islami lebih bisa diterima oleh masyarakat agamis pedesaan, karena setidaknya dua hal yaitu terbebas dari riba dan memiliki semangat saling tolong menolong. Selain itu, keberadaan BMT di tengah-tengah masyarakat bawah menjadikan lembaga BMT ini lebih bisa diakses oleh masyarakat secara langsung.

Jadi eksistensi BMT dapat diterima karena alasan psikologis dan logis. Secara psikologis, BMT dapat diterima masyarakat karena secara teologis didasarkan pada surah al-Maidah ayat 2, yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang perbuatan yang sebaliknya.[5] BMT juga bersifat ***shirkah al-ta'awuniyyah***, yaitu suatu bentuk kerja sama tolong-menolong antarsesama anggota untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.[6] Kerjasama

---

[4] Rentenir adalah lembaga atau perorangan yang beraktifitas meminjamkan uang kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses keuangan, terutama para ibu-ibu rumah tangga atau para pedagang yang ada di pasar dengan bunga yang cukup tinggi. Nilai bunga yang ditarik oleh rentener bisa mencapai 50 % hingga 70 % per tahun. Untuk ekspektasi BMT yang diharapkan mampu mengatasi problem perekonomian yang disebabkan oleh rentener selengkapnya dapat dibaca dalam Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 85.

[5] Dalam al-Qur'an surah al-Māidah ayat 2 disebutkan sebagai berikut;

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

[6] Menurut Mahmud Shaltut, *shirkah ta'awuniyyah* atau lebih dikenal dengan koperasi, merupakan *shirkah* baru yang belum dikenal oleh fuqaha dahulu. Mahmud Syaltut tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tolong menolong ini biasanya diimplementasikan dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan. Sedangkan secara logis, keberadaan BMT diterima karena lebih dekat ke masyarakat dan persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan tidak rumit dan lebih sederhana.

Selain secara ekonomi keberadaan BMT cukup membantu masyarakat, secara sosial BMT juga mempunyai potensi untuk meningkatkan harkat dan martabat nasabahnya dengan pembinaan melalui komunitas-komunitas keagamaan, sosial dan kemasyarakatan. Artinya, BMT mempunyai peluang yang sangat besar untuk menciptakan pemberdayaan ekonomi maupun pemberdayaan sosial di masyarakat melalui keberadaannya sebagai mediasi ekonomi dan sekaligus mediasi sosial.

Beberapa penulis seperti el-Gamal[7], al-Harran[8], Akhtar[9], Dhumale dan Sapcanin[10] percaya terhadap potensi lembaga keuangan syariah, termasuk BMT

---

setuju pada pendapat yang mengatakan bahwa koperasi masuk dalam *shirkah muḍārabah* karena *shirkah ta'awuniyyah* tidak mengandung unsur *muḍārabah*. *Shirkah ta'awuniyyah* itu modal usahanya dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha tersebut dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Jika pemegang saham itu ikut mengelola usaha koperasi, maka ia berhak mendapatkan gaji sesuai dengan sistem perjanjian yang berlaku. Selengkapnya dapat dibaca dalam Mahmud Shaltut, *al-Fatawa*, (Mesir: Dar al-Qalam, t.th), 394.

[7] Mahmoud A. el-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economic, and Practice,* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 153-163.

[8] S. Al-Harran," Islamic Finance Needs A New Paradigm", *New Horizon* Vol. 48. (Feb, 1990), 7-9.

[9] M. R. Akhtar, " Practice and Prospects of *Musharaka* Financing for Small Entreprise in Pakistan", *Journal of Islamic Banking in Finance,* Vol. 13 No. 3 (1996), 7-27.

[10] R. Dhumale and A. Sapcanin, *An Aplication of Islamic Banking Principles to Microfinance*, (United Nations Development Program, Regional Bureau for Arab States, New York, 1998).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam peranannya sebagai intermediasi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin yang sering terabaikan oleh perbankan konvensional. Dengan demikian upaya pemberdayaan masyarakat, baik pemberdayaan ekonomi maupun pemberdayaan sosial melalui BMT semakin berpotensi besar untuk dilakukan.

Semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BMT melalui berbagai pembiayaan dan optimalisasi intermediasi, serta upaya-upaya pemberdayaan lainnya telah disadari sepenuhnya oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, para praktisi, para ilmuwan, serta lembaga-lembaga inkubasi dan lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Salah satu bentuk kepedulian pihak-pihak terkait terhadap upaya pemberdayaan ini adalah dengan menetapkan berbagai bentuk regulasi, sumbangan pemikiran, maupun langkah-langkah nyata pemberdayaan. Misalnya, pemerintah telah mengeluarkan UU perkoperasian, yang termasuk di dalamnya mengatur tentang BMT. Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 pasal 4, disebutkan bahwa fungsi koperasi, termasuk BMT sebagai berikut;

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam modul koperasi jasa keuangan syari'ah (KJKS) yang dikeluarkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah disebutkan bahwa koperasi jasa keuangan syari'ah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syari'ah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan anggota koperasi serta berbagai bisnis yang terkait anggotanya.[11]

Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) juga telah menetapkan tujuan BMT antara lain; a). Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat, b). Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi. c). Mewujudkan gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju, serta d). Mewujudkan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.[12]

---

[11] Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Modul Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan SDM, 2012), 3.

[12] PINBUK, *BMT Sebagai Alternatif Model Lembaga Keuangan Mikro (LKM)*, (Jakarta, PINBUK, t.Th), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa pemikir dan pemerhati BMT seperti Huda dan Heykal juga berpendapat bahwa fungsi BMT adalah; a). Menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, b). Pencipta dan pemberi liquiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan, c). Sumber pendapatan, d). Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut, e). Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), f). Mengidentifikasi, memobilisasi dan mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota mu'amalat atau daerah kerjanya, dan g). Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan potensi kesejahteraan anggota.[13]

Sudarsono secara lebih spesifik menyebutkan peran BMT sebagai berikut; a). menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah, b). melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, c). melepaskan masyarakat dari ketergantungan rentener, d). menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.[14] Jadi BMT memegang peranan strategis dalam rangka membantu pemberdayaan ekonomi dengan melakukan pendampingan

---

[13] Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 363-364.

[14] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui interaksi intensif dalam sebuah komunitas binaan.

Untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsi serta eksistensi peran BMT tersebut maka diperlukan karakter lembaga yang lebih bersifat terbuka dan berorientasi pada pengembangan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini Ahmad menjelaskan bahwa sifat BMT adalah terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan simpanan dan pembiayaan sehingga mampu mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi angota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar.[15]

Namun dalam aplikasinya, model pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT selama ini belum sepenuhnya menuai hasil yang maksimal. Diantara model pemberdayaan yang sering digunakan oleh BMT adalah pembiayaan dengan segmentasi nasabah berdasarkan jangka waktunya atau berdasarkan sistem transaksinya atau berdasarkan sifat penggunaannya. Sekalipun pendekatan pembiayaan seperti ini telah diarahkan menuju pemberdayaan, pembiayaan tersebut belum menuai hasil yang maksimal. Seringkali pembiayaan justru menimbulkan beban bagi nasabah sehingga semakin jauh dari pemberdayaan.

Implementasi pembiayaan saat ini lebih mengarah pada sekedar penyediaan dana bagi nasabah. Sumber dana tersebut tidak jarang diambilkan dari pinjaman pada bank umum, selanjutnya disalurkan sebagai pembiayaan pada

---

[15] Ahmad Syifaul Anam, "Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syariah", (Tesis -- Universitas Diponegoro, Semarang, 2009), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah. Akhirnya, margin keuntungan yang ditetapkan oleh BMT di pedesaan seringkali lebih tinggi jika dikonversikan dengan tingkat suku bunga. Peran seperti ini tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan dalam bingkai kapitalistik konvensional, bahkan lebih membahayakan dilihat dari sudut pandang ekonomi masyarakat yang konsumtif, apalagi membawa nama syari'ah.[16]

Pada sisi yang lain, pola operasional BMT saat ini telah baku, baik dalam hal produk pembiayaan, pelayanan, marketing maupun mekanisme transaksi. Produk yang ditawarkan berupa pembiayaan-pembiayaan antara lain dengan skema *muḍārabah*[17], *mushārakah*[18], *murābaḥah*[19], *salam*[20] dan *istiṣna'*[21].

---

[16] Sekalipun demikian, hal ini telah menjadi strategi yang *trend* dalam rangka mengembangkan BMT di Indonesia. Strategi untuk mempercepat perkembangan BMT adalah melalui *linkage program* dengan lembaga perbankan syariah. Bank-bank syariah bisa menyalurkan pembiayaan mikronya lewat BMT yang jaringannya tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perebutan pasar antara perbankan dan lembaga keuangan mikro syariah yang selama ini sudah menggarap sektor mikro dan menengah. Mereka, para penggiat kelembagaan ekonomi syariah berasumsi bahwa program sinergi ini akan mengoneksikan jaringan bank dan lembaga keuangan mikro sehingga akan mendorong terjadinya transfer manajemen dan teknologi di antara lembaga keuangan syariah. Misalnya, jaringan BMT yang ada saat ini hampir mencapai 5 000-an unit dengan jumlah cabang 22 ribu. Jika saja setiap desa yang kini berjumlah 78.124 memiliki BMT, ini akan mempermudah perbankan melalu BMT mengakses desa-desa yang ada.

[17] *Muḍārabah* adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih di mana salah satu dari mereka bertindak selaku penyedia dana (*ṣahib al māl*)- dalam hal ini adalah *bayt al māl wa tamwīl* (BMT), sedangkan pihak yang lain bertindak selaku managemen. Maksud dilakukannya perjanjian tersebut adalah untuk menjalankan perdagangan, industri atau kegiatan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut selanjutnya akan dibagi antara pihak penyedia dana dan pihak managemen sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Sedangkan kerugian harus ditanggung oleh pihak penyedia dana sesuai dengan proporsi sahamnya dari total modal. Kerugian yang diakibatkan oleh pihak pengelola menyebabkan ia tidak mendapat imbalan atas usahanya.

[18] *Mushārakah* juga merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih. Namun demikian tidak sama dengan *Mudārabah*, tiap *partner* dalam *mushārakah* ikut berkontribusi dalam hal keuangan maupun managemen, meskipun porsinya tidak harus sama. Bagian atas keuntungan tergantung kesepakatan, tetapi bagian atas kerugian ditentukan berdasarkan kontribusi modal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marketing yang dilakukan relatif standar, yaitu memenuhi target pengelolaan keuangan dengan cara mengelola resiko agar mendapatkan keuntungan maksimal. Mekanisme transaksi juga sudah terpola sedemikian rupa secara *computer system* dengan perhitungan *nisbah* maupun *mark up* yang sudah paten.

Dengan karakter BMT tersebut, beberapa pihak di masyarakat akhirnya mempunyai persepsi bahwa antara lembaga keuangan syari'ah dengan lembaga keuangan konvensional sama saja. Salah satu penyebabnya karena sebagian besar produk pembiayaan yang disalurkan oleh BMT adalah produk dengan skema *natural certainty contracts* atau *debt financing*[22], seperti *murābaḥah, istiṣna'* dan

---

[19] *Murābaḥah* (juga disebut *bay' mu'ajjal*) merujuk pada kesepakatan jual beli di mana pihak penjual membeli barang yang diinginkan oleh pihak pembeli lalu menjualnya dengan harga tambahan (*mark-up*) yang disepakati. Pembayaran ditentukan dalam jangka waktu yang disepakati, baik dengan dicicil atau sekaligus. Resiko menjadi tanggung jawab pihak penjual sampai barang tersebut terkirim kepada pihak pembeli.

[20] *Salam* merujuk pada kesepakatan jual beli di mana pembayarannya dilakukan di awal oleh pihak pembeli, sedangkan penyerahan barang oleh penjual dilakukan di kemudian hari (ditangguhkan). Jual beli ini tidak sama dengan jual beli spekulatif *forward* karena menuntut pembayaran secara penuh, bukan margin. Melalui kesepakatan ini, pihak penjual bisa menyelamatkan pembiayaan yang dibutuhkan dengan melakukan penjualan di depan atas sebagian output atau produksi yang diharapkan. Dengan cara demikian, ia tidak akan menghadapi masalah pengiriman pada saat terjadi kegagalan produksi akibat suatu kejadian tertentu.

[21] *Istiṣna'* merujuk pada kesepakatan dimana seorang *developer* (kontraktor) menyetujui untuk membuat atau mengirimkan barang tertentu (berupa janji) pada harga dan waktu tertentu di masa yang akan datang. Seperti halnya *salam*, ada suatu pengecualian, di mana syari'ah melarang menjual barang yang belum ia miliki. *Istisna'* ini berbeda dengan *salam*, di mana pada *salam*, harga harus dibayar di awal, sedangakan pada *istisna'*, bisa dibayar secara mencicil sesuai dengan keinginan para pihak atau melalui pembayaran di awal atau dengan diakhirkan.

[22] Sebagai bahan perbandingan, berdasarkan data statistik perbankan syari'ah 2012, pembiayaan BUS dan UUS mayoritas disalurkan pada *debt financing* yaitu sebesar 60% dengan komposisi *murābahah* 59.74% dan lainnya hampir 1%. Sedangkan pembiayaan bagi hasil *(equity financing)* hanya sebesar 26,87% dengan komposisi *muḍārabah* 8,21%, *musharakah* 18,66%. Sedangkan pada pembiayaan BPRS mayoritas pembiayaan juga disalurkan pada *debt financing* yaitu sebesar 80,60% dengan komposisi *murābahah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salam. Sedangkan pembiayaan dengan skema *equity financing* relatif rendah.[23] Dari pembiayaan yang sebagian besar *debt financing* tersebut, ternyata komposisi pembiayaannya sebagian besar digunakan untuk konsumsi.[24] Padahal menurut Umar Chapra, secara ekonomi jika pasokan uang tidak digunakan sebagai penciptaan produksi secara maksimal, maka hanya akan menimbulkan beban utang dan hal itu akan mengganggu perekonomian individu atau masyarakat.[25]

80,08% dan lainnya hampir 0,6%. Sedangkan pembiayaan bagi hasil *(equity financing)* hanya sebesar 12,21% dengan komposisi *muḍārabah* 2,72%, *musharakah* 9,49%. Diolah dari data *Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia Desember 2012*.

[23] Rendahnya *equity financing* sebenarnya dapat diantisipasi dengan peningkatan kinerja BMT, terutama dari kedisiplinan para karyawan BMT serta peningkatan kualitas karyawan BMT untuk melakukan tindakan antisipasi pembiayaan serta pembinaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Roziq dan kawan-kawan pada BMT-BMT di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa risiko pembiayaan *muḍārabah* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pembiayaan *muḍārabah* dimana koefisiennya sebesar -0.272 dan signifikan dengan t-statistik sebesar 10.401. Menurut Roziq, hubungan ini menunjukkan bahwa semakin besar resiko pembiayaan akan memperkecil kinerja pembiayaan *muḍārabah* begitu juga sebaliknya, jika semakin kecil risiko pembiayaan *muḍārabah* maka semakin besar kinerja pembiayaan *muḍārabah*. Selanjutnya Roziq menyampaikan bahwa kompetensi *account officer* syariah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja pembiayaan *muḍārabah* dengan koefisien sebesar 0.372 dan signifikan dengan t-statistic sebesar 27.460. Berdasarkan analisis korelasi tersebut, maka semakin tinggi kompetensi *account officer* syariah akan mempengaruhi kinerja pembiayaan *muḍārabah* semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah kompetensi *account officer* syariah akan menyebabkan kinerja pembiayaan *muḍārabah* semakin rendah. Selengkapnya dapat dibaca dalam Ahmad Roziq dkk, "Kompetensi Account Officer Syariah, Resiko dan Kinerja serta Kendala Pembiayaan Mudarabah pada BMT-BMT di kabupaten Jember", *Proceeding Annual International Conference on Islamic Studies ke 13* (Mataram, 18-21 Nopember 2013), 1152.

[24] Pembiayaan BUS dan UUS yang digunakan untuk konsumsi sebesar 44,19% sedangkan pembiayaan BPRS yang digunakan untuk konsumsi sebesar 35,16%. Diolah dari data *Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia Desember 2012*.

[25] Menurut Umar Chapra, dalam skala makro, besarnya kepercayaan atas kredit jangka pendek dan aliran dana masuk telah ikut berperan atas terjadinya krisis. Penjelasan lebih lengkap terdapat dalam Umar Chapra, *Reformasi Ekonomi; Sebuah Solusi Perspektif Islam,* Terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena sebagian besar model pemberdayaan BMT menggunakan pendekatan pembiayaan yang klasik serta terpengaruh dengan pola bisnis bank, maka arah pemberdayaan menjadi kurang fokus bahkan terabaikan. Pada akhirnya BMT hanya mengejar tingkat *asset* serta *omset* yang tinggi. Fenomena seperti ini telah terjadi pada sebagian besar BMT-BMT. Lebih parah lagi ketika penilaian terhadap kesuksesan BMT hanya diukur dari banyaknya *asset* yang dimilki serta tingginya *omset* yang didapatkan tiap bulan oleh BMT tersebut.

Satu masalah lagi yang tersisa, yaitu jika BMT hanya menyelenggarakan pembiayaan dengan model yang selama ini dijalankan, maka fungsi BMT hanya terbatas pada fungsi intermediasi ekonomi saja. Sedangkan fungsi intermediasi sosial menjadi terabaikan atau setidaknya kurang optimal. Jika fungsi intermediasi sosial terabaikan, maka tujuan hakiki BMT menjadi tidak terlaksana. Selain itu BMT menjadi tidak mempunyai cukup modal sosial untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena bagaimanapun juga pemberdayaan ekonomi senantiasa terkait dengan masalah-masalah sosial, politik dan budaya.[26]

Dengan demikian, telah terjadi *gap* antara fenomena konseptual dengan fenomena praktis, dimana semangat awal dan tujuan awal pendirian BMT adalah

---

[26] Hal ini sesuai dengan pendapat Kieffer, bahwa maksud dan tujuan dari pemberdayaan adalah membangun kesadaran pada individu dan kelompok tentang keberdayaan serta melibatkan mereka dalam aksi sosial, politik maupun ekonomi sehingga mereka dapat berperan lebih banyak dalam komunitas kehidupan. Dalam hal ini, Kieffer menyimpulkan dari penelitiannya bahwa pemberdayaan memiliki tiga dimensi yang saling berpotongan dan bersinggungan, yaitu; perkembangan konsep diri yang lebih positif, kondisi pemahaman yang lebih kritis dan analitis mengenai lingkungan sosial dan politis, dan adanya sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok. Selengkapnya dapat dibaca dalam Kieffer, *Citizen Empowerment: A Developmental Perspective, Prevention in Human Service*, Vol. 3, USA, Maret, 1984, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun disinyalir dalam realisasinya semakin jauh dari harapan. Persoalan utama yang dihadapi oleh BMT adalah keterbatasan model pemberdayaan yang melibatkan pembiayaan serta dikesampingkannya fungsi intermediasi sosial BMT di masyarakat. Dengan demikian perlu diadakan penelitian yang lebih kritis terhadap BMT dalam hal pencarian model pemberdayaan yang melibatkan pembiayaan BMT serta optimalisasi fungsi intermediasi BMT di masyarakat.

Untuk menjawab masalah-masalah yang timbul tersebut peneliti mengadakan penelitian di salah satu BMT yang dimungkinkan dapat memenuhi upaya-upaya pemberdayaan. Penelitian ini tidak hanya mengupas implementasi pembiayaan di BMT tersebut, namun juga melakukan kritik dan diskusi sehingga ditemukan model pemberdayaan yang sesuai dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk bagaimana mengoptimalkan fungsi intermediasi BMT.

Penelitian dilakukan di BMT Ar-Ridho, Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Sebenarnya di Kabupaten Trenggalek terdapat 11 BMT yang beroperasi, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dari 11 BMT tersebut, terdapat lima BMT yang masih beroperasi dengan baik, sedangkan sisanya beroperasi kurang berhasil bahkan gagal.[27]

[27] BMT-BMT yang ada di Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut; BMT Ar-Ridho, BMT Amanah, BMT Arta Bhaskara, BMT Ridwan Darussalam, BMT Berkah, BMT Diensar, BMT Mahardhika, BMT Sakinah, BMT Permata Ummat, BMT Madani dan BMT Bina Ummat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT Ar-Ridho dinilai berhasil karena memiliki asset yang cukup besar untuk ukuran BMT di desa dan memiliki omset yang cukup besar pula. Asset BMT Ar-Ridho saat ini Rp 10.542.423.820,00 dengan omset rata-rata Rp 115.000.000,00 per bulan.[28] Selain itu BMT Ar-Ridho juga memiliki nasabah yang cukup besar jika dibandingkan dengan BMT-BMT lainnya di Kabupaten Trenggalek. Jumlah nasabah BMT Ar-Ridho saat ini 4.918 orang dan 3.170 orang merupakan nasabah yang masih aktif.[29] Besarnya asset, omset serta jumlah nasabah dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi keberhasilan BMT Ar-Ridho.

Selain dari sisi kuantitas, BMT Ar-Ridho juga dinilai berhasil secara kualitas karena memiliki arah pemberdayaan ekonomi masyarakat sejak awal mula pendiriannya. BMT Ar-Ridho memiliki komitmen untuk membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar dengan cara memaksimalkan pembiayaan dengan menggunakan mekanisme-mekanisme tertentu sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. BMT Ar-Ridho juga mengoptimalkan fungsi intermediasi BMT sehingga bisa menjembatani kepentingan beberapa kelompok masyarakat untuk bersinergi.

BMT Ar-Ridho beroperasi di wilayah pedesaan Kabupaten Trenggalek yang *notabene* merupakan kabupaten yang relatif tertinggal dibanding dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur. Wilayah pedesaan di kabupaten ini juga sangat luas jika dibandingkan dengan wilayah perkotaannya. Penduduk yang tinggal di

[28] Sumber: Neraca BMT Ar-Ridho per 30 Nopember 2014.
[29] Sumber: Dokumen BMT Ar-Ridho Trenggalek 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedesaan juga lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di perkotaan. Karena beroperasi di wilayah pedesaan dengan karakter yang relatif pasif, maka hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi BMT Ar-Ridho untuk menciptakan metode-metode kreatif dalam pembiayaan, pelayanan jasa, maupun optimalisasi fungsi intermediasi menuju upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Indikasi yang menunjukkan keberhasilan BMT Ar-Ridho berikutnya adalah diraihnya beberapa penghargaan atas prestasi yang telah diraihnya. Misalnya pada tahun 2009, BMT Ar-Ridho dinilai sebagai Koperasi Syariah yang "cukup berkualitas" oleh Kementrian Negara Koperasi dan UKM. Selanjutnya pada tahun 2010, BMT Ar-Ridho mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai peringkat ke-II Koperasi Berkinerja Terbaik Tahun 2010 di Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 2013, BMT Ar-Ridho juga mendapat penghargaan dari Kepala Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Industri Kabupaten Trenggalek sebagai Juara I Koperasi Berprestasi se Kabupaten Trenggalek.[30]

Dengan demikian pemilihan BMT Ar-Ridho sebagai obyek penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain; BMT Ar-Ridho dinilai berhasil secara kuantitas dan kualitas jika dibandingkan dengan BMT lainnya di Kabupaten Trenggalek, beroperasi di pedesaan yang *notabene* masyarakatnya relatif pasif, ketersediaan data yang cukup lengkap untuk diteliti, akses yang

[30] Sumber: Dokumen BMT Ar-Ridho 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkan untuk dijangkau, sumber informasi yang berkompeten lebih memungkinkan untuk didapatkan, memiliki beberapa prestasi dan memiliki upaya-upaya kreatif pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat beberapa identifikasi masalah yang memungkinkan untuk diteliti, diantaranya adalah :

1. Ide awal pendirian BMT Ar-Ridho bagi pengembangan masyarakat pedesaan di Kabupaten Trenggalek.
2. Implementasi pembiayaan BMT Ar-Ridho di pedesaan Kabupaten Trenggalek.
3. Peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan Kabupaten Trenggalek oleh BMT Ar-Ridho.
4. Mekanisme pembiayaan BMT Ar-Ridho untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan Kabupaten Trenggalek.
5. Orientasi peran BMT Ar-Ridho dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan Kabupaten Trenggalek.
6. Fungsi intermediasi ekonomi dan intermediasi sosial BMT Ar-Ridho di masyarakat pedesaan Kabupaten Trenggalek.
7. Model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BMT Ar-Ridho Trenggalek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar penelitian ini tidak terlalu melebar, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada tiga hal, yaitu;

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BMT Ar-Ridho Trenggalek.
2. Fungsi intermediasi BMT Ar-Ridho dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan Kabupaten Trenggalek.
3. Mekanisme pembiayaan yang dijalankan oleh BMT Ar-Ridho untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan Kabupaten Trenggalek.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diteliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BMT Ar-Ridho Trenggalek?
2. Bagaimana fungsi intermediasi BMT Ar-Ridho dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana mekanisme pembiayaan yang dijalankan oleh BMT Ar-Ridho untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan Kabupaten Trenggalek?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk memahami, mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BMT Ar-Ridho Trenggalek.
2. Untuk memahami, mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan fungsi intermediasi BMT Ar-Ridho dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk memahami, mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan mekanisme pembiayaan yang dijalankan oleh BMT Ar-Ridho untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan Kabupaten Trenggalek

E. Kegunaan Penelitian

Setidaknya ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu;

1. Manfaat teoritis, bahwa dari penelitian ini diharapkan akan ditemukan dan dipahami upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan yang dilakukan oleh BMT dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh BMT dalam menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan melalui pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh BMT. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi dunia akademik tentang karakter dan pola ekonomi masyarakat pedesaan, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan, serta fungsi yang seharusnya dilakukan oleh BMT dalam menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan melalui mekanisme pembiayaan BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sedangkan secara praktis, hasil temuan ini dapat menjadi masukan bagi penggiat ekonomi syari'ah pada umumnya dan pengelola BMT pada khususnya untuk memposisikan dengan benar fungsi yang seharusnya dilakukan dalam menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan, sekaligus sebagai bahan rekomendasi dan pengembangan BMT bagi para pengambil kebijakan dan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk sampai pada penelitian tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengambil kasus di BMT Ar-Ridho Trenggalek, sebelumnya telah didahului oleh beberapa penelitian terkait yang dibaca oleh peneliti. Pembacaan terhadap penelitian terdahulu ini sebagai bahan untuk mengantarkan pada posisi penelitian yang sedang dilakukan. Diantara penelitian terdahulu tersebut antara lain;

1. A M Sasanti[31], menulis tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Jakarta, studi sosiologis di Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Penelitian ini menitikberatkan pada dua kelompok masyarakat pelaksana program yakni kelompok masyarakat yang berhasil dan kelompok masyarakat yang tidak berhasil. Indikatornya adalah perubahan gaya hidup periode sebelum program dan sesudah dilaksanakannya program. Dari penelitian kedua kelompok ini diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat dapat memberdayakan

[31] A M Sasanti, "Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Jakarta :Studi sosiologis di kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat". (Tesis--Universitas Indonesia, Jakarta:2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya apabila diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya. Program pembangunan direkomendasikan agar tidak lagi bersifat "*top down policy*", tetapi sudah harus bersifat "*bottom up policy*". Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis pada pengembangan potensi masyarakat yang diberdayakan. Perbedaannya pada fokus obyek, Sasanti menggunakan obyek masyarakat perkotaan sedangkan penulis menggunakan obyek masyarakat desa.

2. Sylvana Ratina[32] menulis disertasi dengan judul Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berkelanjutan. Penelitian menghasilkan penemuan rumusan konsep hipotetik model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan. Modal sosial masyarakat sekitar hutan akan termanfaatkan secara optimal mekanisme konsep timbal balik, konsep saluran informasi dan konsep ketaatan norma, adat dan nilai budaya. Disertasi ini berkaitan dengan disertasi yang akan dilakukan oleh penulis karena menyangkut persoalan pemberdayaan masyarakat. Selain itu fokus pemberdayaannya juga masyarakat desa, khususnya masyarakat sekitar hutan. Hanya saja terdapat perbedaan sarana yang menjadi bagian upaya pemberdayaan. Disertasi yang dilakukan oleh Sylvana menggunakan sarana pengelolaan hutan dalam pemberdayaan,

[32] Sylvana Ratina, "Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berkelanjutan", (Disertasi--Universitas Indonesia, Jakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan penulis mengkaitkannya dengan peran BMT dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Syaiful Bahri[33] menulis tentang faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi keluarga pada program gerdu taskin di Kabupaten Jombang. Hasil penelitian dengan menggunakan metode regresi linier berganda ini menunjukkan bahwa variabel persepsi penerima program, intervensi perangkat desa dan kinerja tenaga pendamping masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap program pemberdayaan ekonomi keluarga di Kabupaten Jombang. Keterkaitan tesis ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada faktor apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Almasdi Syahza dan Henny Indrawati[34], menulis tentang pemberdayaan koperasi berbasis agribisnis di daerah pedesaan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa koperasi memegang peranan penting pada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di pedesaan. Koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha di pedesaan untuk menyelesaikan permasalahan permodalan dan pelaksana penuh pemasaran produk agribisnis. Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bahwa penelitian ini sama-sama dilakukan di pedesaan, namun penulis tidak

---

[33] Syaiful Bahri, "Faktor-Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pada Program Gerdu Taskin di Kabupaten Jombang", (Tesis--Universitas Airlangga, Surabaya, 2005).

[34] Almasdi Syahza dan Henny Indrawati, "Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis di Daerah Pedesaan", *Sosiohumaniora*, Vol. 12 No. 3 (November 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan instrumen koperasi konvensional, namun menggunakan instrumen koperasi syariah.

5. Syafii Antonio dan Hilman Nugraha[35] yang meneliti tentang peran intermediasi sosial. Penelitian tersebut berjudul Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin. Hasil penelitian literatur ini menghasilkan temuan bahwa peran intermediasi sosial dapat dilakukan dengan mempergunakan dana-dana sosial yang sesuai dalam perspektif Islam seperti zakat, infaq, sadaqah, waqaf dan hibah dapat diaplikasikan menjadi produk atau kebijakan tambahan perbankan syariah dalam melayani masyarakat miskin melalui beberapa strategi, yaitu melalui pendirian unit usaha khusus intermediasi sosial dan atau kerjasama dengan lembaga keuangan mikro syariah khusus bagi masyarakat miskin.
6. Sholihin, meneliti tentang perilaku konsumen terhadap produk BMT di BMT Kharisma, Magelang, Jawa Tengah. [36] Temuannya di lapangan menyatakan bahwa motif yang mempengaruhi konsumen dalam memilih BMT sebagai mitra usaha diantaranya adalah motif konsumen yang cenderung menghindari dari riba. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada faktor dan motif yang melandasi masyarakat memilih produk BMT.

---

[35] Syafii Antonio dan Hilman Nugraha, "Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin". *Tsaqafah,* Vol. 9, No. 1 (April 2013).

[36] Sholihin, "Perilaku Konsumen terhadap Produk BMT di BMT Kharisma, Magelang, Jawa Tengah", (Tesis – Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Era Ikhtiani Rois[37] menulis tentang Peran BMT Barokah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Pasar Gesikan, Magelang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pembinaan terhadap nasabah sangat diperlukan karena akan membantu nasabah guna meningkatkan usaha mereka baik secara teknis maupun mental dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul pada usaha mereka. Apabila usaha mereka maju maka perekonomian keluarga akan dapat teratasi, para pelaku usaha dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Penelitian yang dilakukan oleh Era Ikhtiani Rois ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menyangkut peran BMT dan pemberdayaan. Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengedepankan pada pergeseran peran menuju pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi intermediasi BMT dan mekanisme pembiayaan yang terarah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga difokuskan pada BMT-BMT di pedesaan.

8. Neni Sri Imaniyati[38] menulis tentang aspek-aspek hukum BMT dalam perspektif hukum Islam. Penelitian yang telah dipublikasikan dalam prosiding ini menghasilkan temuan bahwa BMT memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat papa dan usaha mikro yang tidak

---

[37] Era Ikhtiani Rois, "Peran BMT Barokah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Pasar Gesikan, Magelang", (Tesis – UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011)

[38] Neni Sri Imaniyanti. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil).* Bandung: Citra Adtiya Bhakti, 2010. Atau dapat pula dibaca dalam Neni Sri Imaniyati, "Urgensi Penguatan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi," dalam Proceedings Seminar dan Dialog Budaya antara Indonesia dengan Uni Eropa, Universitas Islam Bandung Tanggal 15 - 16 Desember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

punya akses ke perbankan. Hanya saja hingga saat ini belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang BMT sehingga operasional BMT menggunakan peraturan yang sangat beragam. Akibatnya bentuk dan hukum BMT juga beragam walaupun sebagian besar berbadan hukum koperasi.

Mapping hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

Tabel 1.1.
***Mapping* Hasil Penelitian Terkait**

No	Peneliti dan Tahun Terbit	Tema dan Tempat Penelitian	Temuan Penelitian
1	A M Sasanti (2006)	Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Jakarta	Masyarakat dapat memberdayakan dirinya apabila diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya
2	Sylvana Ratina (2010)	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Secara Berkelanjutan	Model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan.
3	Syaiful Bahri (2006)	Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Jombang	Persepsi penerima program, intervensi perangkat desa dan kinerja tenaga pendamping berpengaruh signifikan terhadap program pemberdayaan ekonomi keluarga di Kabupaten Jombang
4	Almasdi Syahza dan Henny Indrawati (2010)	Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis di Daerah Pedesaan (Riau)	Koperasi mampu menyelesaikan permasalahan permodalan dan pelaksana penuh pemasaran produk agribisnis.
5	Syafii Antonio dan Hilman F	Peran Intermediasi Sosial Perbankan	Peran intermediasi sosial dilakukan dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Nugraha (2010)	Syariah bagi Masyarakat Miskin	mempergunakan dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sadaqah, waqaf dan hibah untuk diaplikasikan menjadi produk atau kebijakan tambahan perbankan syariah melalui beberapa strategi, yaitu melalui pendirian unit usaha khusus intermediasi sosial dan atau kerjasama dengan lembaga keuangan mikro syariah khusus bagi masyarakat miskin.
6	Sholihin (2003)	Perilaku Konsumen terhadap Produk BMT Kharisma (Magelang)	Motif yang mempengaruhi konsumen dalam memilih BMT yaitu karena menghindari riba
7	Era Ikhtiani Rois (2011)	Peran BMT Barokah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Pasar Gesikan (Magelang)	Pembinaan terhadap nasabah sangat diperlukan karena akan membantu nasabah guna meningkatkan usaha mereka baik secara teknis maupun mental dalam menghadapi hambatan-hambatan usaha mereka.
8	Neni Sri Imaniyati (2011)	Aspek-aspek Hukum BMT dalam Perspektif Hukum Islam	Belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang BMT sehingga operasional BMT menggunakan peraturan yang sangat beragam. Akibatnya bentuk dan hukum BMT juga beragam walaupun sebagian besar berbadan hukum koperasi.

Sumber: Modifikasi peneliti, 2014.

Secara umum keterkaitan beberapa penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut; *Pertama*, peneliti ingin mengetahui apakah pemberdayaan masyarakat bisa terjadi dengan melibatkan BMT dengan segala aktifitasnya selama ini. Oleh karena itu apakah fungsi BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya sebatas pada pembiayaan dan permodalan saja atau lebih dari itu? Disinilah dibutuhkan teori pemberdayaan sebagai *guide*. Bagaimana sebaiknya model pemberdayaan yang melibatkan BMT sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa diwujudkan. Sehubungan dengan permasalahan ini, peneliti telah membaca dan mempelajari penelitian yang ditulis oleh Sasanti, Sylvana Ratina, Syaiful Bahri serta Almasdi Syahza dan Henny Indrawati.

Selanjutnya yang *kedua* adalah bagaimana seharusnya peran yang dimainkan oleh BMT dalam upayanya turut memberdayakan perekonomian masyarakat di pedesaan? Apakah fungsi intermediasi ekonomi saja sudah cukup atau memerlukan fungsi intermediasi yang lain seperti fungsi intermediasi sosial? Bagaimana mengoptimalkan fungsi intermediasi sosial tersebut? Oleh karena itu penelitian yang dilakukan oleh Syafii Antonio dan Hilman Nugraha dapat menjadi panduan juga dalam penelitian ini.

Sedangkan yang *ketiga*, peneliti ingin mengetahui apakah pembiayaan yang telah dilakukan oleh BMT telah tepat sasaran dengan memperhatikan kaidah-kaidah pemberdayaan masyarakat maupun pertimbangan kearifan lokal atau hanya sekedar melakukan pembiayaan saja asalkan aset dan omset BMT bisa berkembang? Jika demikian, maka apa yang membedakan BMT dengan lembaga keuangan konvensional lainnya? Tentu hal ini harus dipahami dari sudut pandang visi dan misi BMT maupun motif nasabah yang menginginkan pembiayaan. Jika motif nasabah sejak awal ingin menghindari riba namun tidak mendatangkan pemberdayaan, maka apakah hal yang demikian itu menghasilkan kemaslahatan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu perlu adanya keterkaitan penelitian yang berhubungan dengan mekanisme pembiayaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini peneliti membaca dan mempelajari penelitian Solihin, Era Ikhtiani Rais, dan Neni Sri Imaniyati.

G. Metode Penelitian

1. *Setting* Penelitian

Penelitian dilakukan di BMT Ar-Ridho Trenggalek atas beberapa pertimbangan, antara lain; data cukup tersedia, akses melakukan penelitian lebih terbuka serta informan lebih berkompeten. Selain ketiga pertimbangan tersebut, BMT Ar-Ridho mewakili masalah penelitian, terutama berkaitan dengan mekanisme pembiayaan yang mengarah pada pemberdayaan.

2. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Ar-Ridho serta fungsi intermediasi dan mekanisme pembiayaan yang dijalankan. Penelitian ini bersifat induktif karena peneliti terjun ke lapangan secara langsung, mempelajari proses yang tenjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan untuk menemukan makna dan melaporkannya untuk selanjutnya menarik kesimpulan dari proses tersebut.

3. Situasi Sosial dan Pemilihan Informan

Situasi sosial dalam penelitian ini melibatkan pelaku, aktifitas dan obyek serta tempat tertentu. Penelitian ini meneliti berbagai kegiatan pembiayaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intermediasi ekonomi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BMT Ar-Ridho di wilayah pedesaan Kabupaten Trenggalek. Kegiatan tersebut meliputi proses dan interaksi yang melibatkan nasabah BMT, managemen BMT dan lembaga-lembaga yang terkait dengan pemberdayaan. Informan meliputi informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci yaitu; a) manager BMT Ar-Ridho, b) Ketua Bidang Usaha Riil BMT Ar-Ridho, c) Ketua Bidang Pembiayaan BMT Ar-Ridho, d) Ketua Bidang Pembinaan/Survey BMT Ar-Ridho. Sedangkan informan pendukung adalah dari kalangan nasabah yang ditetapkan dengan *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data di lapangan didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif. Sedangkan wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Data juga dikumpulkan melalui dokumen yang memungkinkan diakses, seperti laporan keuangan, laporan kinerja, struktur organisasi, daftar dewan pendiri BMT, sertifikat dan piagam penghargaan.

5. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat John W. Creswell[39] dengan langkah-langkah mereduksi data, membaca keseluruhan data, *coding* data menjadi tema-tema dan deskripsi, menghubungkan tema dan

[39] John W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskripsi-deskripsi, menginterpretasikan data-data dan deskripsi-deskripsi, dan menarik kesimpulan.

6. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan dengan validitas dan reliabilitas. Prosedur validitas meliputi; trianggulasi, menerapkan *member checking*, membuat deskripsi yang lebih padat tentang hasil penelitian, melakukan refleksi terhadap kemungkinan munculnya bias dalam penelitian, memperpanjang masa penelitian, *peer debriefing* dan meminta saran dari *reviewer* atau *external auditor*. Sedangkan prosedur reliabilitas meliputi; pengecekan hasil transkrip, gambar maupun data lapangan, b) membandingkan data-data dengan *coding* agar tidak ada defiasi dan makna yang mengambang, c) melakukan *cross-check* dan membandingkan dengan kode-kode yang dibuat oleh peneliti lain.

H. Sistematika Bahasan

Penelitian ini ditulis dalam lima bab, dengan alur sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, dimana berkembangnya ekonomi Islam ditandai dengan menjamurnya BMT hingga ke desa-desa. BMT diharapkan mampu mensejahterakan anggotanya dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun dalam implementasinya terdapat persoalan karena pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT cenderung klasik dan yaitu hanya sebagai penyalur dana saja. Hal itu akan menimbulkan *mismatch* kepentingan sehingga memungkinkan muncul kontra produktif dari implementasi pembiayaan BMT. Oleh karena itu perlu diteliti pemberdayaan yang melibatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan BMT serta optimalisasi fungsi intermediasi BMT. Pada bab pendahuluan ini juga dibahas rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika bahasan.

Selanjutnya pada bab II dijelaskan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, fungsi intermediasi BMT, mekanisme pembiayaan BMT serta pemberdayaan ekonomi masyarakat ditinjau dari syariah Islam. Penjabaran teori-teori pemberdayaan penting sebagai *guide* dalam penelitian. Dalam bab ini dijabarkan tentang penelitian terdahulu untuk melihat sisi-sisi yang sama maupun yang berbeda dengan penelitian ini serta keterkaitannya dalam hal obyek maupun subyek penelitian. Dalam bab ini pula dijabarkan kerangka konseptual penelitian untuk memahami alur penelitian.

Bab III memaparkan hasil penelitian, meliputi profile dan kinerja BMT Ar-Ridho yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penjelasan ini penting karena akan didapatkan gambaran yang jelas tentang karakteristik dan pola ekonomi masyarakat, faktor produksi yang dibutuhkan, pola kerja, pola konsumsi masyarakat, sikap dan prilaku masyarakat binaan, dan sebagainya. Dari gambaran ini, maka dapat dianalisis mekanisme pembiayaan BMT Ar-Ridho serta optimalisasi fungsinya menuju pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Bab IV merupakan analisis hasil penelitian yang dilakukan dengan konfirmasi pada semua item yang diteliti sehingga bisa mendapatkan hasil yang komprehensif berupa upaya yang seharusnya dilakukan oleh BMT dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan. Analisis juga melibatkan dialog antara *scientific worldview, Islamic worldview* dan *grand theory* yang berkaitan dengan pemberdayaan. Analisis ini penting karena menemukan *model pemberdayaan* sekaligus implikasi teoritik dan implikasi praktis penelitian ini. Dengan implikasi teoritik dan implikasi praktis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan juga dalam jangka pendek dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, misalnya pihak BMT atau pengambil kebijakan, termasuk nasabah dan calon nasabah. Pada bab ini pula dilakukan verifikasi data hingga menemukan sebuah kesimpulan.

Bab V berisi kesimpulan, implikasi teoritik dan praktis, keterbatasan studi dan rekomendasi yang ditujukan pada semua *stakeholders* BMT dan juga kepada dunia akademik serta masyarakat pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id